

Peranan Sosial Media Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Ismi Sujastika^{1*}, Yayuk Hidayah², Meiwatizal Trihastuti³

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

²Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

³STKIP Pasundan, Cimahi, Indonesia

Abstrak— Politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Berbagai kebijakan politik dibuat oleh pemerintah sebagai produk politik. Politik yang sehat selalu melibatkan masyarakat sebagai objek politik utamanya. Di era yang serba canggih saat ini proses keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan dapat memanfaatkan beragam media, utamanya media teknologi. Teknologi informasi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan politik yang disiarkan melalui media berteknologi dapat sampai kepada masyarakat dengan mudah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sosial media dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial media berperan secara langsung dan positif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Indonesia.

Kata kunci:

sosial media,
pendidikan politik,
masyarakat

Histori:

Dikirim: 27 Maret 2024
Direvisi: 28 Maret 2024
Diterima: 28 Maret 2024
Online: 2 April 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Sujastika, Ismi., Hidayah, Yayuk., & Trihastuti, Meiwatizal. (2024). Peranan Sosial Media Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 704-712.

PENDAHULUAN

Politik merupakan bagian penting peradaban manusia. Konon kegiatan berpolitik sudah dilakukan sejak zaman para Nabi, bahkan jauh sebelum kota-kota tua ditemukan dalam sejarah. Politik memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan, dimulai dari kehidupan bernegara, sampai dalam tataran kehidupan yang paling sederhana, yaitu keluarga. Pentingnya politik dalam kehidupan, banyak sekali tokoh yang membuat kajian politik. Banyak pula konsep-konsep politik yang terus dikembangkan guna menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang dihadapi. Pada masa kini, sebagaimana disadari bahwa zaman yang sedang dihadapi adalah perkembangan teknologi informasi bersamaan dengan arus globalisasi yang tidak bisa dibendung. Maka politik sebagai keyakinan tentang tatanan pola kehidupan

^{1*}Corresponding author.

E-mail: yayukhidayah@uny.ac.id

yang ideal Budiardjo (2016) mencoba menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman yang dihadapi. Konsep politik tidak lagi kaku terpaku pada satu ideologi saja, akan tetapi turut serta dalam menentukan sikap demi menghadapi problematika politik yang dihadapi sebagai tantangan zaman. Politik secara bertahap memasuki sendi-sendi kehidupan manusia melalui berbagai media, teknologi, dan informasi. Politik adalah seni dalam kehidupan yang tidak bisa serta merta dikuasai oleh seseorang tanpa mempelajari dengan baik. Pembelajaran berpolitik ini kerap dipahami dengan istilah pendidikan politik.

Selain bentuk sosialisasi politik, pendidikan politik juga diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat (Damsar, 2010:181). partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft (dalam partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. Dari keseluruhan definisi pendidikan politik tersebut dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk memaknai proses sosialisasi di dalam masyarakat sehingga nilai-nilai politik yang ada dalam suatu sistem pemerintahan ideal yang akan dibangun dapat dipahami dengan baik, dimana akhirnya muncul pemahaman politik yang ideal dan budaya politik baru yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pendidikan politik juga dipahami sebagai kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai moral dan orientasi politik bagi individu. Pendidikan politik diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi politik di negaranya dengan berbagai cara dan media yang digunakan. Umumnya, media berpolitik pada era saat ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.

Masyarakat menanggapi perkembangan teknologi sebagai media untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka yang juga terus berkembang. Termasuk kebutuhan untuk mewujudkan kekuasaan. Perkembangan teknologi secara umum memberi pengaruh di berbagai sendi kehidupan, antara lain adalah perubahan, konflik, serta integrasi (Susanto, 2010). Pengaruh yang demikian besar ini mendorong mobilitas manusia yang tidak terikat oleh ruang dan waktu (Lee dalam Susanto, 2010). Dalam pandangan politik, perkembangan teknologi dapat memudahkan dalam penyebaran informasi dan gambaran tertentu dari seluruh kegiatan politik. Hal ini ditengarai dengan fakta bahwa perkembangan teknologi informasi erat kaitannya dengan perkembangan media komunikasi, jaringan, komputer, dan internet. Dengan memanfaatkan media komunikasi yang terhubung dengan saluran internet, masyarakat bisa dengan mudah mengakses beragam informasi politik yang ingin diketahui. Hakikat ilmu politik adalah kekuasaan. Kekuasaan ini berupa proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik selalu berkenaan dengan kepentingan publik. Hal ini disebabkan karena keputusan politik secara umum meliputi dua hal utama, yaitu program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara (kebijakan umum), serta orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum (Surbakti, dalam Nasiwan, 2012).

Sosial media dimanfaatkan bagi politisi sebagai alat untuk membuat beberapa pendekatan politik dalam masyarakat. Menurut Mirian Budiardjo (dalam Cholisin,

2012) bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh orang yang ingin mencapai kekuasaan dalam politik. Diantaranya adalah pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pasca-perilaku, dan pendekatan marxis. Pendekatan tradisional dalam politik adalah dengan menempatkan sisi konstitusional sebagai landasan utama dalam berpolitik. Dalam pendekatan tradisional, politik diaplikasikan dengan memahami terlebih dahulu mengenai definisi kekuasaan dan wewenang, hubungan formal dengan badan eksekutif, serta struktur organisasi politik. Adapun pendekatan Perilaku berpusat kepada perilaku perorangan, organisasi, kelompok, serta masyarakat politik. Bagian yang paling menonjol dalam pendekatan perilaku adalah pandangannya tentang masyarakat. Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Pendekatan pasca-perilaku (post behavior) merupakan reaksi terhadap pendekatan perilaku yang dinilai kurang fungsional. Pendekatan Marxis adalah keinginan membahas masalah-masalah sosial dari perspektif holistik dan dialektis serta memberikan tekanan pada kegiatan negara dan konflik kelas.

Berbicara tentang konsep politik tentu harus ditinjau kembali dari teori politik yang digunakan sebagai pijakan dasarnya. Secara umum ada empat teori politik yang secara umum dijadikan pijakan dalam pendekatan politik. Antara lain adalah teori politik klasik, teori behavioralisme, teori kritis, dan teori politik Islam (Nasiwan, 2012). Teori politik klasik lahir atas dasar pemikiran-pemikiran politik oleh filsuf berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam politik, dimana titik beratnya adalah moral, keadilan, kebijakan serta keseimbangan antara hak individu dan kelompok. Tujuan dari teori politik klasik ini adalah adanya semangat rakyat untuk menghasilkan sumber daya sebagai modal utama terlaksananya program pemerintah demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Dalam nalar sederhana, penggunaan sosial media sebagai wahana untuk kepentingan politik bertolak dari teori behavioralisme yang dikembangkan oleh David Easton (Dalam Varma, 2010) yang mana dijelaskan bahwa tujuan ilmu politik behavioral adalah untuk memahami dan menggambarkan berbagai fenomena politik secara realistis. Dalam teori behavioral diyakini bahwa kegiatan berpolitik masyarakat dilakukan atas dasar proses belajar, melalui mengalami trial and eror demi mengenali dan mewujudkan kebutuhan untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Easton (dalam Nasiwan, 2012) menitikberatkan kepada tuntutan dan dukungan yang diberikan masyarakat sebagai dasar dari kebijakan yang diambil dalam proses politik.

Dengan memahami teori behavior sebagai suatu pendekatan politik dalam masyarakat artinya kegiatan politik yang berlangsung sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Umpamanya dalam menggunakan media komunikasi. Berangkat dari perkembangan teknologi saat ini, maka media komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pasti akan melibatkan teknologi juga. Seluruh kehidupan masyarakat secara praktis beralih dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Politik yang merupakan kegiatan untuk mencapai kepentingan pun dikemas menyesuaikan perkembangan teknologi. Penyampaian kegiatan politik sangat kental dengan media komunikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan politik. Nurdin (2017) mengemukakan setidaknya ada tiga jenis saluran komunikasi politik yang digunakan dalam

masyarakat, yaitu media komunikasi massa, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi.

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri membuat penggunaan teknologi sebagai media komunikasi semakin masive. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 % di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022 tercatat 67,88% penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87 % (BPS, 2022). Tingginya minat masyarakat pada penggunaan teknologi di Indonesia, dimana dalam hal ini ditengarai oleh pesatnya perkembangan telepon seluler, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan teknologi informasi dalam meningkatkan pengetahuan politik warganegara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana peranan sosial media dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat?. Tujuan penelitian ialah mengeksplorasi peranan sosial media dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Manfaat teoretis ialah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran sosial media dalam memberikan pendidikan politik. Manfaat praktis memberikan panduan kepada pemerintah, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil dalam penggunaan sosial media untuk menyampaikan pendidikan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Naratif atau Historis. Pendekatan Naratif atau historis merupakan suatu metode di dalam penelitian ilmu sosial yang digunakan untuk memahami sebuah perspektif berdasarkan kepada cerita-cerita (narasi) yang didengarkan/dituturkan (Fadli, 2021). Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik historiografi, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber tertulis, lalu dilakukan reduksi, kesimpulan, serta display data (Daliman, 2014).

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep tahapan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2015) yaitu: 1. Identifikasi masalah, 2. Literature review, 3. Menentukan tujuan penelitian, 4. Pengumpulan Data, 5. Analisis dan interpretasi data, dan 6. Pelaporan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode triangulasi data, dimana seluruh data penelitian yang diperoleh digabungkan menjadi satu, kemudian dilakukan pengecekan berdasarkan sumber, waktu dan teknik yang dilakukan dalam memperoleh data tersebut (Wijaya, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Dalam Masyarakat

Pendidikan politik dalam masyarakat memainkan peran krusial dalam pembentukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks politik. Hidayah,Y, IstiqomahA, Prasetyo,R,A, Arpannudin,I (2024) menyatakan jika pendidikan politik dalam masyarakat memainkan peran krusial dalam pembentukan

warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks politik. Dalam konteks ini, Melalui pendidikan politik masyarakat dapat memahami sistem politik yang ada, proses demokrasi, serta hak-hak politik dan sipil yang mereka miliki. Li K, Jing M, Tao X, Duan Y. (2023) berpendapat jika dengan berkembangnya masyarakat jaringan, kehidupan mahasiswa diselimuti oleh masyarakat jaringan, dan semakin banyak saluran bagi mereka untuk menghubungi berbagai macam informasi, yang membawa tantangan baru bagi perilaku ideologis dan ideologis mereka.

Selain sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik, pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis dalam masyarakat. Eko Handoyo dan Puji Lestari (2017) menyatakan jika pendidikan politik untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara. Dengan memahami berbagai perspektif politik dan belajar untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Pendidikan politik membantu mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri, membuat keputusan yang informasional, dan berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif tentang masalah-masalah politik yang relevan.

Selanjutnya, pendidikan politik berperan dalam membangun keberagaman dan inklusi dalam masyarakat. Mirshak, N. (2020) berpendapat jika pendidikan politik di masyarakat sipil mengembangkan kerangka yang bersifat lebih terselubung. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif politik dan budaya, pendidikan politik membantu mengurangi ketegangan antar kelompok dan memperkuat hubungan antar-etnis serta antar-agama dalam masyarakat. Ini membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi semua kelompok dalam masyarakat.

Pendidikan politik berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan. Zavala, M., & Henning, N. (2021) menyatakan proyek pendidikan politik harus dipahami secara relasional bahwa “guru sebagai pengorganisir masyarakat” adalah paradigma yang penting dan muncul dalam pendidikan guru yang berkeadilan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, pendidikan politik membantu memperkuat lembaga-lembaga demokratis, memperluas ruang partisipasi publik, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan berkeadilan, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kepentingan bersama dan dengan pertimbangan yang baik atas hak-hak serta aspirasi semua warga.

Teknologi Informasi Sebagai Media Berpolitik

Teknologi informasi telah mengubah lanskap politik secara signifikan dengan memperluas akses informasi dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Gao H-W. (2023) menyatakan jika munculnya era Internet telah membawa perubahan besar pada cara hidup dan bekerja masyarakat, dan kenyamanan serta efisiensinya telah mendorong pesatnya perkembangan masyarakat. Karena itulah, teknologi informasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik secara lebih cepat dan mudah. Dengan adanya internet dan media sosial, individu dapat dengan mudah mengakses berita, riset, dan analisis politik dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan

masyarakat untuk menjadi lebih terinformasi tentang isu-isu politik yang relevan dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik.

Teknologi informasi memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui platform daring. Yuen, T. W. W., & Leung, Y. W. (2009). menyatakan jika Isu-isu kontroversial membantu pemahaman tentang kompleksitas pendidikan politik di satu sisi, dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pendidik yang bekerja di bidang pendidikan politik di sisi lain. Pemerintah dapat menggunakan media sosial dan situs web resmi untuk berkomunikasi dengan warganya, menyampaikan kebijakan publik, dan mendengarkan umpan balik dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau dukungan kepada pemerintah secara langsung. Ini menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara pemerintah dan warga negara.

Teknologi informasi memungkinkan adanya ruang untuk diskusi dan debat politik di platform daring. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan forum daring memungkinkan individu untuk berbagi pandangan mereka tentang berbagai isu politik, berdiskusi dengan orang lain, dan membangun jejaring dengan mereka yang memiliki minat politik yang sama. Ribeiro, N., Malafaia, C., & Ferreira, T. (2023) menyatakan jika perdebatan tentang apakah usia dalam diskusi dan debat politik menyadari pentingnya bidang ini dalam kurikulum sekolah. Hal ini menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog politik.

Berdasarkan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sosial dan Politik (CSPE), penekanan yang lebih besar pada kewarganegaraan yang partisipatif dan berorientasi pada keadilan selaras dengan kewarganegaraan partisipatif (O'Brien, G, 2023). Dalam teknologi informasi sebagai media berpolitik, Perlu diingat bahwa penggunaan teknologi informasi dalam politik juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau disinformasi, privasi yang rentan, dan potensi polarisasi opini. Oleh karena itu, sementara teknologi informasi dapat menjadi alat yang powerful dalam mendukung pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk memitigasi risiko-risiko ini dan memastikan bahwa akses dan penggunaan teknologi informasi dalam politik berlangsung dengan adil, aman, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan jika peranan sosial media dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dapat melibatkan masyarakat sebagai objek utamanya, dan di era digital saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik melalui berbagai cara, terutama melalui media teknologi. Selain itu, sosial media memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pendidikan politik secara langsung dan positif kepada masyarakat di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosial media. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan konten yang informatif, edukatif, dan mudah diakses tentang isu-isu politik yang relevan.

REFERENSI

- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar ilmu Politik* (edisi revisi; cetakan ketigabelas). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar ilmu Politik* (edisi revisi; cetakan ketigabelas). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin., & Nasiwan. (2012). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Creswell, J. W. (2015). *Riset pendidikan: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi riset kualitatif & kuantitatif* (edisi kelima). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasiwan. (2012). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Susanto, E.H. (2010). *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- _____. (2013). *Komunikasi Politik Pesan Kepemimpinan dan Khalayak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Varma, SP. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Raya.
- Qusyaeri, N., & Tabroni, R. (2017). *Komunikasi Politik M.Natsir*. Yogyakarta: Suluh media.
- Artikel Bagian (Bab) Buku
- Faisal, S. (2010). Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif. Dalam B. Bungin (editor), *Analisis data penelitian kualitatif: pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi* (h. 64–79). Jakarta: Rajawali Pers.
- Finnegan, R. (2006). Using documents. Dalam R. Sapsford & V. Jupp (editor), *Data collection and analysis* (edisi kedua, h. 138–152). New Delhi: Sage Publications.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika* (Terjemahan Syafruddin, M Y. Alimi & M. N. Khoiron). Yogyakarta: LKIS.
- Laplace, P. S. (1951). *A philosophical essay on probabilities* (Terjemahan F. W. Truscott & F. L. Emory). New York, NY: Dover.
- Rachman, F. (2018). *Konstruksi partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup dalam wacana pembangunan berkelanjutan* (Studi kasus artikel opini media massa pada surat kabar harian di Kota Medan). (Tesis). Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Prasetyo, W. H., Budimansyah, D., & Roslidah, N. (2016). Urban farming as a civic virtue development in the environmental field. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(9), 3139–3146. doi: 10.12973/ijese.2016.909a
- Simarmata, S. (2014). Media baru, ruang publik baru, dan transformasi komunikasi politik di Indonesia. *Jurnal Interact*, 3(2), 18-36.
- Fatanti, M. N. (2014). *Twitter dan masa depan politik indonesia: Analisis perkembangan komunikasi politik lokal melalui internet*. JURNAL

- IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi), 16(1), 17-30.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348. DOI: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Rachman, F., & Al Muchtar, S. (2018, November). Sustainable development discourses on construction of citizen participation in community care for environment. Dalam Annual Civic Education Conference (ACEC 2018). Atlantis Press. Tersedia dalam <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.79>.
- Rachman, F. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan berkelanjutan dan tantangan ketegangan. Dalam B. Mulyono, M. Murdiono, Halili, I. Arpanudin, & Suyato (editor), *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-II; Penguatan Kajian Isu-isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks Kependidikan dan Non-Kependidikan* (h. 209–221). Yogyakarta: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan AP3KnI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Petunjuk pelaksanaan beasiswa dan dana bantuan operasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurwardani et al., (2016). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- Hidayah, Y, Istiqomah A, Prasetyo, R, A, Arpanudin, I (2024). Penguatan keterampilan kewarganegaraan melalui keterlibatan dalam menunjang penalaran moral mahasiswa (Studi Pada Himpunan Mahasiswa PKnH UNY). *Journal Genta Mulia*. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>
- Li K, Jing M, Tao X, Duan Y. (2023). Research on online management system of network ideological and political education of college students. *International Journal of Electrical Engineering & Education*. 2023;60(2_suppl):377-388. doi:10.1177/0020720920983704
- Mirshak, N. (2020). Education as Resistance: Egyptian Civil Society and Rethinking Political Education Under Authoritarian Contexts. *Critical Sociology*, 46(6), 915-930. <https://doi.org/10.1177/0896920519856398>

- Eko Handoyo dan Puji Lestari. (2017). Pendidikan Politik, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Zavala, M., & Henning, N. (2021). The Role of Political Education in the Formation of Teachers as Community Organizers: Lessons From a Grassroots Activist Organization. *Urban Education*, 56(7), 1137-1163. <https://doi.org/10.1177/0042085917727574>
- Gao H-W. (2023). Innovation and development of ideological and political education in colleges and universities in the network era. *International Journal of Electrical Engineering & Education*. 2023;60(2_suppl):489-499. doi:10.1177/00207209211013470
- Yuen, T. W. W., & Leung, Y. W. (2009). Political Education: Controversial Issues, Neutrality of Teachers and Merits of Team Teaching. *Citizenship, Social and Economics Education*, 8(2-3), 99-114. <https://doi.org/10.2304/csee.2010.8.2.99>
- Ribeiro, N., Malafaia, C., & Ferreira, T. (2023). Lowering the voting age to 16: Young people making a case for political education in fostering voting competencies. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(3), 327-343. <https://doi.org/10.1177/17461979221097072>
- O'Brien, G. (2023). Differences in the teaching of civic, social and political education: An analysis of the impact of school gender. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(2), 161-181. <https://doi.org/10.1177/17461979211062118>